

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak memiliki berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan didefinisikan sebagai terjadinya kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Kuncoro, 1997). Menurut Khalifah Umar Bin Khatab kemiskinan memiliki makna bukanlah orang-orang yang tidak memiliki harta, akan tetapi orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh (Andina & Wahyudi, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

Menurut Bappenas dalam Badan Pusat Statistik (2023) kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan individu atau kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar tersebut mencakup akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, kepemilikan lahan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, perlindungan dari ancaman kekerasan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik tanpa diskriminasi gender.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kapabilitas Sen. Menurut Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan keterbatasan individu dalam mengakses kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh kebebasan substantif.

Melalui pendekatan kapabilitas, Sen mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kapabilitas yang berbeda dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Perbedaan kapabilitas ini mempengaruhi seseorang untuk mengubah pendapatan dan hal-hal pokok (*primary goods*) lainnya menjadi kebebasan yang bernilai dalam kehidupan. Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Sunaryo, 2017).

Kapabilitas setiap individu pada dasarnya tidak sama. Perbedaan kondisi pribadi setiap individu dan perbedaan tempat tinggal akan membuat kapabilitas setiap orang menjadi berbeda. Sen mengidentifikasi empat hal yang harus

diperhatikan dalam melihat kapabilitas individu atau kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Keragaman Pribadi (*heterogenitas personal*)

Menurut Sen, setiap individu memiliki karakteristik fisik yang berbeda, mencakup variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, level ketidakberdayaan, kecenderungan penyakit, serta berbagai atribut personal lainnya.

2. Perbedaan Alam dan Lingkungan

Kemampuan untuk mengubah pendapatan menjadi sesuatu yang bernilai sangat bergantung pada kondisi alam dan lingkungan. Perbedaan kondisi alam dan lingkungan tempat tinggal berimplikasi pada perbedaan kapasitas masyarakat dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi capaian yang diharapkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan infrastruktur dasar.

3. Perbedaan Kondisi Sosial

Kondisi sosial meliputi masalah sistem pelayanan kesehatan publik, epidemiologi, tata kelola pendidikan publik, tingkat kekerasan, kriminalitas dan lain-lain. Faktor-faktor ini membentuk kerangka institusional yang memengaruhi kapabilitas individu dalam mencapai kesejahteraan.

4. Perspektif Relasi dan Keterlibatan dalam Komunitas

Dimensi ini menekankan pentingnya hubungan sosial dan partisipasi dalam komunitas sebagai faktor yang mempengaruhi kapabilitas individu. Melalui keberagaman faktor, Sen hendak menunjukkan dalam masalah kemiskinan, perlu dilihat kesempatan atau kemampuan setiap orang dalam mengubah kondisi yang

ada menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, keberagaman faktor juga dapat digunakan untuk melihat posisi seseorang dalam sebuah tata sosial dan dalam perumusan kebijakan yang harus diambil pemerintah.

Todaro dan Smith (2011) menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi pada negara berkembang antara lain:

1. Pendapatan nasional yang rendah dan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
2. Rendahnya pendapatan per kapita di negara berkembang.
3. Distribusi pendapatan diantara penduduk tidak merata.
4. Sebagian besar penduduk dinegara berkembang berjuang dengan kemiskinan ekstrem
5. Layanan dan infrastruktur kesehatan yang buruk dan tidak memadai menjadi pemicu kekurangan gizi dan berbagai wabah penyakit.
6. Infrastruktur dan program pendidikan yang umumnya tidak relevan dan kurang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kemiskinan absolut

Kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kondisi seseorang karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20% atau 40 % lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Dalam Islam memandang bentuk kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan hidup. Adanya kemampuan dan potensi dalam hidup, seseorang harus mengupayakan untuk terhindar dari kemiskinan. Apabila tetap terjadi kemiskinan, yang perlu dilakukan adalah dengan sabar dan tawakal kepada Allah SWT dibarengi dengan usaha untuk terlepas dari kemiskinan itu. Beberapa penyebab kemiskinan menurut Al Quran. Diantaranya :

1. Kemiskinan yang disebabkan ketidaktaatan terhadap ajaran Illahi.

Contohnya kemiskinan yang terjadi pada seseorang yang menindas anak yatim dan tidak memberi makan anak yatim. Sesuai dengan Al Quran surat Thaha ayat 124 yang berbunyi:

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit...” (Q.S Thaha :124)

2. Kemiskinan yang disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri dengan tidak bertanggungjawabnya orang kaya terhadap orang miskin.

Sesuai dengan Al Quran surat Al Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (Q.S Al-Maun :1-3)

3. Kemiskinan yang disebabkan oleh sifat malas bekerja.

Dalam Al Quran Surat Al Jumu'ah ayat 10

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah...” (Q.S Al Jumu'ah :10)

Ini berimplikasi bahwa kemiskinan bukan sebuah takdir dan Nasib hidup, tetapi karena kemalasan manusia itu sendiri.

4. Kemiskinan yang disebabkan situasi terkonsentrasinya kekuasaan politik ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari Kisah Fir'aun dengan kaum Israel Mesir dan perbedaannya dengan Zaman Rasulullah SAW dan Kaum Quraisy. Al Qashash ayat 7 :

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka...”

Inilah kemudian zakat diwajibkan agar harta tidak terfokus pada golongan tertentu.

Badan Pusat Statistik (2023) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), indikator yang digunakan antara lain:

1. Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index* atau P0)

Yaitu proporsi penduduk hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurun jumlahnya seiring dengan menurunnya angka P0. menunjukkan semakin sedikitnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebaliknya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat seiring dengan peningkatan angka P0.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* atau P1)

Yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara garis kemiskinan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk miskin. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar perbedaan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin buruk kondisi ekonomi penduduk miskin.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau P2)

Yaitu menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Distribusi pendapatan di kalangan penduduk miskin akan lebih merata bila angka ini lebih rendah.

2.1.2 Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan (Adrian & Lutfi, 2023). Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nisab dan haul untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima

(*mustahik*). Sementara itu, infaq dan sedekah bersifat sukarela yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Penyaluran ZIS yang dikelola secara baik dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya untuk menciptakan keadilan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui zakat, infaq, dan sedekah. Melalui penyaluran dana ZIS dari kelompok masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam perekonomian. Dengan demikian, pengelolaan ZIS yang optimal dapat berperan dalam mendukung terciptanya keadilan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

2.1.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkembang, berkah, bertambahnya kebaikan, dan terkadang diartikan menyucikan. Seperti firman Allah Swt dalam Al Quran surat Asy- Syams ayat 9 yang artinya:

“Sesungguhnya menanglah orang yang telah menyucikan jiwanya”(Q.S. Asy- Syams : 9).

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah standar harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya bila mencapai nishab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mensucikan hamba dan mensucikan serta

menunjukkan kebenaran iman pada dirinya. Adapun definisi zakat menurut al-Azhari bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan materiil dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Rasulullah menjelaskan bahwa: “Sesungguhnya Allah menolong hambanya manakala hamba itu suka menolong saudaranya”. Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar-benar beriman seperti dicantumkan dalam firman Allah dalam Al Quran surat At Taubah ayat 18 dan ayat 71 yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. At- Taubah : 18).

Dan dipertegas di ayat 71 yang artinya sebagai berikut:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah : 71).

Dalam hubungannya dengan diri sendiri (muzakki), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa, dan memebersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah, akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Dengan ini jelaslah bahwa zakat mempunyai kedudukan penting bagi muzakki untuk menjadikannya bisa menjadi tuan terhadap hartanya dan bukannya menjadi budaknya harta. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103).

Karena itulah dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka (muzakki). Pembersihan dan pensucian ini meliputi material, yaitu harta dan spritual, yaitu jiwa. Berzakat berarti membersihkan harta dari segala keburukannya, dan memeliharanya dari berbagai kemungkinan bencana yang mugkin terjadi. Sementara itu di sisi lain, zakat sangat penting artinya bagi muzakki, untuk mensucikan jiwanya dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu

mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, membangun hubungan batin dan rasa cinta sesama. Sementara itu, zakat juga sangat penting artinya dalam menjaga harmonisasi kehidupan dalam masyarakat, dengan memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sudah menjadi sunnatullah bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hal kemampuan ekonomi.

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat, salah satunya adalah firman Allah SWT yang menyertakan kewajiban zakat sesudah kewajiban mendirikan Shalat dalam Al Quran surat Al-Baqarah Ayat 110 yang artinya:

“Dan dirikanlah Shalat serta tunaikanlah Zakat..” (QS. Al-Baqarah : 110).

Dari penjelasan ayat- ayat Al- Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib, bukan hanya karena termasuk rukun Islam. Akan tetapi zakat juga dapat membersihkan harta seseorang menjadi berkah dan tumbuh. Selain itu zakat dapat menolong orang- orang yang kurang mampu.

2.1.2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata dalam bahasa Arab *“anfaqa-yunfiqu”* yang bermakna mengeluarkan, membelanjakan baik harta yang dimiliki. Dalam terminologi syariah, infaq berarti membelanjakan atau mengeluarkan sebagian kekayaan dan pendapatan untuk mendukung kepentingan yang ditentukan oleh ajaran Islam (Hastuti, 2016).

Infaq berbeda dengan zakat. Dalam infaq tidak terdapat ketentuan nisab maupun batasan jumlah tertentu sebagaimana dalam zakat. Ketentuan infaq bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masyarakat.

Tujuan utama infaq adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar hukum infaq terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infaqkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat yang tercantum diatas menggambarkan mengenai nafkah yang diberikan dan cara dalam mencari nafkah tersebut. Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah sesuatu yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik dan kedua adalah dari hasil usaha yang dikeluarkan Allah dari bumi (Shihab, 2005).

2.1.2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Sedekah

Kata sedekah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa arab *“Asshodaqoh”* yang berarti benar. Sedekah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan secara spontan dan sukarela dari seorang muslim kepada orang lain, tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Dapat juga diartikan sebagai sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebaikan yang hanya mengharap ridha Allah SWT saja. Pemahaman sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqaha (ahli fiqih) disebut sebagai shadaqah at-tatawun (sedekah secara spontan dan sukarela). Para ulama juga berpendapat bahwa sedekah dapat dimaknai dengan infaq, zakat, dan kebaikan non materi (Nur, 2023).

Para fuqaha“ menyepakati bahwa sedekah dasar hukumnya adalah sunah, mendapatkan pahala bila dikerjakan dan rugi bila ditinggalkan. Kesepakatan itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah : 280).

Ayat ini diperkuat Hadits bahwasannya Nabi Muhammad SAW. mengeluarkan perintah terhadap setiap muslim agar setiap hari bersedekah, itu sebagai penegasan atas pentingnya sedekah dalam tasyri“(perundang-undangan) dan menjelaskan kedudukan sedekah, serta menetapkan hukumnya terhadap setiap umat (Wardana, 2018).

2.1.2.4 Kriteria Wajib Zakat (Muzakki) dan Penerima Zakat (Mustahik)

1. Wajib Zakat (Muzakki)

Orang yang wajib berzakat disebut muzakki. Murtadho et al., (2025) menyebutkan para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka, berakal, dan memiliki harta tertentu sesuai syarat yang ditetapkan syariat. Zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengajarkan syahadat, salat, kemudian zakat yang diambil dari orang kaya Muslim dan diberikan kepada fakir miskin mereka. Dengan demikian, kewajiban zakat berkaitan langsung dengan keislaman seseorang dan termasuk salah satu dari lima rukun Islam.

Syarat wajib zakat yang utama adalah beragama Islam, karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa. Orang yang sejak awal bukan Muslim tidak dikenai kewajiban zakat. Mengenai orang murtad, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika ia kembali masuk Islam, maka wajib membayar zakat selama masa murtadnya, sedangkan mazhab Hanafiyah tidak mewajibkannya.

Selain itu, zakat hanya diwajibkan atas orang yang merdeka dan memiliki harta secara sempurna (*al-milk at-tam*), yaitu harta yang berada dalam kekuasaannya dan dapat dimanfaatkan tanpa terikat hak orang lain. Harta tersebut juga harus termasuk harta yang berkembang, baik berkembang secara nyata seperti perdagangan dan peternakan, maupun berkembang secara potensi seperti emas dan uang.

Kewajiban zakat berlaku apabila harta telah mencapai nisab, yaitu batas minimal yang telah ditentukan untuk masing-masing jenis harta. Untuk jenis harta seperti emas, perak, uang, dan ternak, disyaratkan pula telah mencapai haul, yaitu dimiliki selama satu tahun hijriyah. Adapun zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan haul, melainkan dikeluarkan setiap kali panen.

2. Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat adalah salah satu elemen dari rukun Islam dan wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah terkena syarat wajib berzakat yakni nisab dan haulnya. Dan bagi yang sengaja meninggalkannya akan mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala. Mustahik zakat adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hal ini karena zakat diharapkan dapat

membantu memenuhi kebutuhan dasar golongan yang memerlukan tersebut. Mustahik zakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat.

Delapan Asnaf para mustahik tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an, Adapun delapan golongan yang berhak menjadi Mustahik ialah:

1. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu. Seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan harian Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) sementara kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Jadi untuk menutupi setengah kebutuhannya saja tidak mampu.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan). Misalkan orang-orang yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) padahal kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).
3. Amil, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya.
4. Mu'allaf, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar menjadi kuat hatinya dan tetap memeluk agama Islam.

5. Riqab, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya.
6. Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya.
7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang suka rela berperang di jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
8. Ibnu Sabil atau orang yang lagi dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah ataupun sunnah.

2.1.2.5 Teori Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Teori Distribusi Kekayaan Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah menyatakan (*al-zulmu mu'dzinun bi kharāb al-'umrān*) yang berarti bahwa ketidakadilan dapat menyebabkan kehancuran suatu peradaban dan kemakmuran masyarakat. Teori tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, seperti penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu atau terbatasnya akses ekonomi bagi sebagian masyarakat, maka hal tersebut dapat melemahkan aktivitas ekonomi serta menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat bahkan meningkatnya lingkaran kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut pemikiran

Ibnu Khaldun, terciptanya sistem ekonomi yang adil menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.1.3.1 Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pandangan dari Teori Klasik bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (supply). Selain itu, teori klasik percaya bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*Say's Law*), artinya produksi barang dan jasa akan menciptakan pendapatan yang cukup sehingga tidak ada kekurangan permintaan agregat yang menyebabkan pengangguran.

Menurut Sukirno (2004) pengangguran didefinisikan sebagai keadaan ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja yang ada.

Berdasarkan penyebabnya Sukirno (2004) mengklasifikasikan pengangguran ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Pengangguran normal atau friksional

Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

2. Pengangguran siklikal,

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

3. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

4. Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok:

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka terjadi karena tidak adanya lowongan pekerjaan, tingkat kesempatan kerja lebih rendah dibanding dengan tenaga kerja yang lebih tinggi. Hal ini berdampak tidak adanya pekerjaan yang menyebabkan mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, hal ini disebut dengan pengangguran terbuka.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang para pekerjaanya bekerja pada perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja sehingga

pekerja tersebut tidak bekerja sesuai dengan keterampilan atau keahlian dengan latar belakang pendidikannya. Mereka sebenarnya tidak menganggur namun bekerja. Akan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang keahlian yang berlatang belakang pendidikannya.

3. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau perubahan dalam permintaan tenaga kerja secara berkala. Pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian. Karena dalam sektor pertanian sangat tergantung pada musim-musim tertentu para tenaga kerja dapat mengolah sektor pertaniannya. Terdapat tenaga kerja pertanian yang menganggur di musim kering atau setelah panen. Sebagian petani akan menganggur sambil menunggu masa tanam.

4. Pengangguran setengah menganggur

Tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari lamanya bekerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaannya tidak optimal atau masih kurang. Pekerja dengan jam normal yaitu 30-40 jam perminggu. Pengangguran ini benar-benar memiliki pekerjaan tetapi bekerja di bawah jam normal pekerja. Pengangguran ini sering disebut juga dengan *Under Unemployment*.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator utama dalam mengukur pengangguran. Indikator TPT ini menggambarkan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang sedang menganggur dan aktif mencari pekerjaan dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Menurut Padang dan Murtala (2020) pengangguran terbuka adalah terciptanya pengangguran akibat dari lebih rendahnya penambahan lapangan kerja dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi

dapat menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jika tingkat pengangguran rendah pertumbuhan ekonominya meningkat, begitu juga sebaliknya. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \left(\frac{\text{jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \right) \times 100$$

Tingginya TPT memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap kemiskinan. Ketika angka pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat akan menurun secara drastis, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan di mana masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk keluar dari keterbatasan ekonomi.

2.1.3.2 Teori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi yang saling berkaitan dan terus berulang dalam suatu siklus. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung memiliki kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan yang layak, serta meningkatkan kualitas kesehatannya. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik juga semakin terbatas. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap rendah dan kemiskinan terus berlanjut dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ketenagakerjaan, teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat memperkuat siklus

kemiskinan. Individu yang menganggur tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Keterbatasan pendapatan tersebut pada akhirnya menghambat akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan peluang kerja menjadi semakin terbatas dan pengangguran cenderung tetap tinggi. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang luas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk memutus lingkaran kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

2.1.4.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2012) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sedangkan menurut Baldwin dalam (Richardson, 1995) ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin.

Menurut Ibnu Khaldun dalam Almuqoddimah (2008), ketimpangan pendapatan berasal dari ketidakadilan, ketidakadilan ini dapat dipahami sebagai kondisi tidak meratanya distribusi kekayaan dalam masyarakat yang disebabkan oleh ketidakadilan kebijakan, lemahnya solidaritas sosial, serta terganggunya aktivitas produksi dan pembangunan. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan tingkat pembangunan (*'umrān*), ketersediaan

sumber daya, dan kekuatan solidaritas sosial di masing-masing wilayah, yang memengaruhi tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat sangat bergantung pada keadilan penguasa dalam mengelola harta dan kebijakan ekonomi. Ketidakadilan, terutama dalam bentuk pemungutan pajak yang berlebihan dan praktik kekuasaan yang zalim, akan mengurangi semangat produksi masyarakat, menurunkan pendapatan, serta memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harta (*al-māl*) diperoleh melalui kerja dan produksi. Apabila negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha secara bebas dan adil, maka aktivitas ekonomi berkembang dan kesejahteraan meningkat secara merata. Namun, ketika penguasa bertindak represif dan membebani rakyat dengan pajak tinggi, maka produksi melemah, perdagangan menurun, dan kekayaan hanya berputar di kalangan elite kekuasaan. Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan ketimpangan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagai pondasi peradaban. Ia menyatakan bahwa ketidakadilan adalah penyebab utama kehancuran suatu negara, karena ketidakadilan menghilangkan insentif kerja, merusak distribusi kekayaan, dan mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, ketimpangan pendapatan dipandang sebagai akibat dari rusaknya sistem keadilan dan melemahnya solidaritas sosial (*ashabiyah*) dalam masyarakat.

2.1.4.2 Gini Rasio

Indikator sebagai pengukuran ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Nilai tersebut didasarkan pada penghasilan bersih masyarakat dan untuk menentukan kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, dengan nilai 0 mewakili kesetaraan sempurna dan nilai 1 mewakili ketidaksetaraan sempurna. Indeks gini yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatannya semakin merata, sebaliknya indeks gini yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatannya semakin timpang. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, begitupun sebaliknya antar kelompok penerima pendapatan. Menurut Todaro (2003) ada tiga kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini yaitu:

- 1) Tingkat ketimpangan tinggi: lebih dari 0,5
- 2) Tingkat ketimpangan sedang: antara 0,35-0,5
- 3) Tingkat ketimpangan rendah: kurang dari 0,35

2.1.4.3 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kuznets, dalam penelitian (Perwitasari et al., 2023), ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap awal pembangunan, kemudian ketika mencapai tahap lebih lanjut dari pembangunan, pembagian pendapatan menjadi lebih kecil. Kuznets menggambarkan penjelasan tersebut dalam bentuk kurva yang sering disebut sebagai kurva Kuznets. Menurut kuznets, ketimpangan pendapatan tidak selalu naik atau turun secara konsisten, tetapi mengikuti pola tertentu selama proses pembangunan ekonomi.

2.1.5 Infrastruktur

2.1.5.1 Pengertian Infrastruktur

Menurut Todaro dan Smith (2011) infrastruktur ekonomi merupakan berbagai fasilitas fisik dan sistem layanan yang menjadi dasar bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Infrastruktur ekonomi mencakup berbagai elemen penting yang mendukung produktivitas, efisiensi, serta pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi, energi, komunikasi, air bersih dan sanitasi, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menyatakan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses perluasan kebebasan dan kemampuan (*capabilities*) yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Infrastruktur menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperluas kapabilitas tersebut, karena keberadaan infrastruktur yang memadai memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar tenaga kerja, serta berbagai peluang ekonomi lainnya. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat membatasi pilihan hidup masyarakat dan menghambat pengembangan kapabilitas mereka, sehingga berpotensi mempertahankan kondisi kemiskinan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu

wilayah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, serta berbagai peluang ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian oleh Aziz et al., (2025) menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup

2.1.5.2 Teori Infrastruktur

Dalam kerangka teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, infrastruktur dipandang sebagai sarana penting dalam memperluas kapabilitas individu, yaitu kemampuan nyata untuk mencapai kehidupan yang layak. Ketersediaan infrastruktur seperti listrik memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kegiatan ekonomi, serta informasi, sehingga memperluas pilihan dan peluang hidup mereka. Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai faktor yang memperkuat kebebasan dan kesempatan individu dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6
1	(Munandar et al., 2020) Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia	• ZIS • Tingkat Kemiskinan	• Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	• ZIS berpengaruh negatif signifikan • pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial. • Secara simultan kedua variabel memiliki pengaruh signifikan	Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 01, No. 01 (2020), hal. 25-38 E-ISSN:2715-954X, 21 Februari 2020
2	(Lestari & Huzaini, 2024) Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Rata-Rata Lama Sekolah, Pengangguran, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di NTB Periode 2014–2023	• ZIS • Tingkat Kemiskinan	• Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	• Zakat, Infak, dan Sedekah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. • Pengangguran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. • Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4, No. 1, November 2024 ISSN: 2828-5298
3	(Widiastuti & Kosasih, 2021)	• ZIS	• Tingkat Pengangguran Terbuka	• Zakat, Infak, dan Sedekah berpengaruh	Maro: Jurnal

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	• Tingkat Kemiskinan	• Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	- negatif tetapi tidak signifikan • Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. • Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan	Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 4 Nomor 1, Mei 2021 E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X
4	(Wulandari & Pratama, 2022)(Wulandari & Pratama, 2022)	• ZIS • Tingkat Kemiskinan	• Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	• ZIS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan. •	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 03 Tahun 2022 ISSN 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
5	(Amalia, 2017) Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (Data Nasional)	• Tingkat Pengangguran • Kemiskinan	• ZIS • Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	• Pengangguran berpengaruh positif signifikan • Pendidikan berpengaruh negatif signifikan - Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan	<u>Jurnal At-Tawassuth</u> Vol.II, No.2, 2017
6	(Karolinska et al., 2023) Pengaruh	• Tingkat Pengangguran	• ZIS	• Pengangguran berpengaruh	Jurnal Pendidikan

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan IPM terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara	• Kemiskinan	• Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	positif dan signifikan • IPM berpengaruh negatif dan signifikan • Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan	Ekonomi UM Metro e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 213-225
7	(Praja et al., 2023) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta	• Tingkat Pengangguran Terbuka • Kemiskinan	• ZIS • Ketimpangan pendapatan • Infrastruktur	• Pengangguran dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan • IPM berpengaruh tidak signifikan • Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan	Jurnal Ecoplan Vol. 6 No. 1, April 2023, hlm 78-86
8	(Sari, 2021) Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	• Tingkat Pengangguran Terbuka • Tingkat Kemiskinan	• ZIS • Ketimpangan Pendapatan • Infrastruktur	• Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan • Secara simultan berpengaruh signifikan	Equilibrium Volume 10. No. 2. Tahun 2021 eISSN 2684-9313 Hal 121 - 130 pISSN 2088-7485
9	(Putra et al., 2022) Pengaruh Laju	• Ketimpangan Pendapatan	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka	• Gini Ratio berpengaruh positif tidak signifikan	Jurnal Ekonomi &

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Blitar Tahun 2011- 2020	• Kemiskinan	• Infrastruktur	• Semua variabel berpengaruh secara simultan.	Pendidikan , 18(2), 2021
10	(Aini & Nugroho, 2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran , dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	• Ketimpangan Pendapatan • Pengangguran • Kemiskinan	• ZIS • Infrastruktur	• Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif tidak signifikan • Pengangguran berpengaruh positif signifikan • Semua variabel berpengaruh secara simultan.	Buletin Ekonomika Pembangunan Vol.4 No.1 Februari 2023, hal 20-36
11	(Manalu et al., 2024) Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022 Provinsi Jawa Tengah	• Ketimpangan Pendapatan • Kemiskinan.	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka • Infrastruktur	• Gini Ratio berpengaruh positif tapi tidak signifikan • Semua variabel berpengaruh secara simultan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 4 No. 2 Bulan Oktober 2023 – Maret 2024 E-ISSN 2723-6951

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
12	(Setya & Tohirin, 2024) Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2023	• Ketimpangan Pendapatan • Pengangguran • Kemiskinan	• ZIS • Infrastruktur	• Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan • Pengangguran berpengaruh negatif signifikan • Semua variabel berpengaruh secara simultan.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 3 Issue 2, 2024: 227-234
13	(Zam, 2025) Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan Kabupaten Buru Selatan, Maluku	• Infrastruktur • Kemiskinan	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan Pendapatan	• Infrastruktur berpengaruh negatif signifikan	Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 1, Januari 2025, 285 - 299
14	(Christiani & Nainupu, 2021) Pengaruh Akses Internet, Listrik dan PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan	• Infrastruktur • Kemiskinan • data panel.	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan Pendapatan	• Infrastruktur Internet, Infrastruktur Listrik dan PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Statistika Terapan Vol. 1 (1) 202 ISSN 2807-6214

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	di NTT Tahun 2015-2019 Nusa Tenggara Timur				
15	(Tinambunan et al., 2019) Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013- 2017	•Infrastruktur •Kemiskinan	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan Pendapatan	• Infrastruktur Listrik berpengaruh positif signifikan • Infrastruktur Air berpengaruh negatif dan signifikan • Infrastruktur Jalan berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Juli 2019, 8(1): 20-42 ISSN : 1979-5149
16	(Saputra et al., 2025) Faktor Infrastruktur yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel di Indonesia	•Infrastruktur •Kemiskinan	• ZIS • Tingkat Pengangguran Terbuka • Ketimpangan Pendapatan	• Infrastruktur Listrik berpengaruh negative tidak signifikan • Panjang jalan berpengaruh positif signifikan • Jumlah Sekolah dan Air berpengaruh negatif signifikan	Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains Vol 3, No 1, July 20

2.2 Kerangka pemikiran

Menurut Sugiyono (2013) kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai aspek penting dalam suatu permasalahan.

Sen berargumen bahwa pembangunan seharusnya difokuskan pada perluasan kapabilitas individu melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan

kesempatan sosial-ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengukur kesejahteraan tidak hanya dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengkonversi sumber daya menjadi fungsi-fungsi yang bermakna dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, teori ini menggarisbawahi bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menghambat pengembangan kapabilitas, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasi hambatan struktural dalam masyarakat (Sunaryo, 2017).

2.2.1 Hubungan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara zakat infaq sedekah dengan tingkat kemiskinan mempunyai arah hubungan negatif, yang dimana ketika zakat infaq sedekah naik maka tingkat kemiskinan akan menurun. Dalam perspektif teori kapabilitas Amartya Sen, zakat infaq sedekah berperan dalam meningkatkan kapabilitas individu melalui perluasan akses terhadap kebutuhan dasar, peluang ekonomi, dan kesejahteraan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah*, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan aktivitas ekonomi yang produktif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kekayaan yang beredar secara merata akan mempersempit kemiskinan, sedangkan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperluas kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munandar et al., (2020) bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Adrian dan Lutfi (2023) yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat, infaq, sedekah berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020. Hal ini tentunya sejalan dengan teori bahwa manfaat dan fungsi zakat, infaq dan sedekah adalah untuk membantu orang-orang miskin agar terlepas dari benang kusut kemiskinan.

Dengan demikian, baik menurut Amartya Sen maupun Ibnu Khaldun, mekanisme distribusi seperti ZIS memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, baik melalui perlindungan sosial maupun melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan mempunyai arah hubungan positif, yang dimana ketika tingkat pengangguran terbuka naik maka tingkat kemiskinan akan ikut naik juga. Dalam kerangka teori kapabilitas, pengangguran dapat dipahami sebagai bentuk deprivasi kapabilitas, yaitu kondisi ketika individu kehilangan kesempatan nyata untuk mengembangkan potensi dan mencapai kehidupan yang layak. Kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan, tetapi juga membatasi akses terhadap berbagai aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, serta partisipasi sosial dan ekonomi. Akibatnya, individu yang menganggur mengalami keterbatasan dalam memperluas pilihan hidupnya (*capabilities*), sehingga semakin rentan terjebak dalam kemiskinan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin besar pula keterbatasan kapabilitas masyarakat, yang pada

akhirnya memperkuat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Karolinska et al., (2023) yang menyatakan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2020. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi dan bermacam-macam dapat membuat mereka bekerja keras mencukupi kebutuhannya.

Korelasi positif antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan mencerminkan bahwa tingginya jumlah pengangguran merupakan indikator kelemahan struktural dalam pasar tenaga kerja serta ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya manusia. Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran yang tinggi menandakan rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja yang dapat disebabkan oleh stagnasi pertumbuhan sektor riil, rendahnya investasi, serta ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

2.2.3 Hubungan Ketimpangan Pendapatan Dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat kemiskinan mempunyai arah hubungan positif, yang dimana ketika ketimpangan pendapatan naik maka tingkat kemiskinan akan ikut naik juga. Dalam kerangka teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, Individu dengan pendapatan yang lebih

tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas, sementara kelompok berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan dalam memperluas pilihan hidupnya. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan kesempatan dan kebebasan, sehingga memperkuat keberlangsungan kemiskinan dalam jangka panjang.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmayani (2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2016-2024.

Keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan terletak pada distribusi kapabilitas di dalam masyarakat. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar pula potensi terjadinya kesenjangan kebebasan dan peluang, yang pada akhirnya dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan.

2.2.4 Hubungan Infrastruktur Dengan Tingkat Kemiskinan

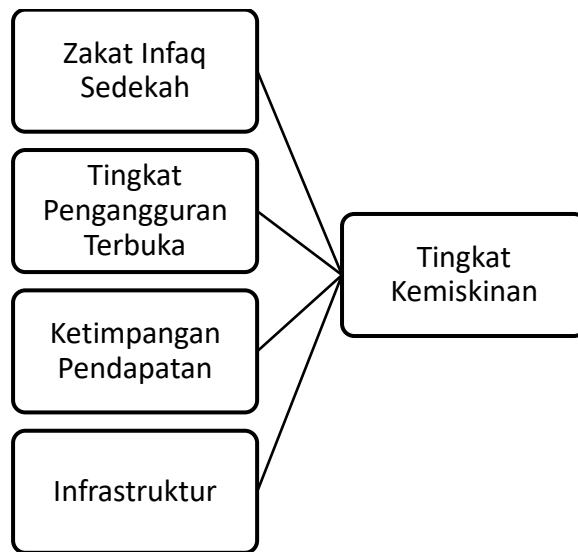
Hubungan antara infrastruktur dengan tingkat kemiskinan mempunyai arah hubungan negatif, yang dimana ketika pembangunan infrastruktur diperluas maka tingkat kemiskinan akan menurun. Menurut Amartya Sen salah satu cara memperluas kapabilitas yaitu melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur yang memadai memungkinkan rumah tangga untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih efektif, seperti usaha mikro dan industri rumahan. Selain itu, keberadaan infrastruktur juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kemudahan akses terhadap sarana belajar serta teknologi

informasi. Dari sisi kesehatan, infrastruktur yang baik menunjang pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta akses terhadap informasi kesehatan. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat produktivitas masyarakat, membatasi peluang usaha, serta mempersempit akses terhadap berbagai layanan dasar, sehingga berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Aziz et al., (2025) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2009-2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Besarnya koefisien regresi sebesar -0,131 menunjukkan bahwa setiap peningkatan infrastruktur sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,131% secara signifikan.

Dengan demikian, hubungan antara infrastruktur dan tingkat kemiskinan bersifat negatif, dimana peningkatan pembangunan infrastruktur akan mendorong penurunan tingkat kemiskinan karena infrastruktur mampu memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa zakat infaq sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan infrastruktur memiliki hubungan yang erat terhadap kemiskinan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial zakat infaq sedekah dan infrastruktur berpengaruh negatif, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan periode tahun 2019-2024.
2. Diduga secara bersama-sama zakat, infaq, sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan tahun 2019-2024.